

**KINERJA PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN
BIDANG PEMELIHARAAN JALAN DALAM MELAKUKAN
PENGAWASAN KONTRAKTOR DI DINAS PUPR KABUPATEN
LAMPUNG TIMUR**

Erwin Putubasai, M. Harviend Gilang P, Henni Kusumastuti, Achmad Cholid

^{1,2,3,4}Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

e-mail: gilang.saburai@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Kinerja Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Bidang Pemeliharaan Jalan dan mengetahui Pengawasan Kontraktor di Dinas PUPR Kabupaten Lampung Timur. Peneliti mengumpulkan data dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi, sedangkan analisis yang digunakan analisis kualitatif. Berdasarkan hasil lapangan menunjukkan bahwa pengawasan pemeliharaan jalan yang dilakukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Bidang Pemeliharaan Jalan terhadap kontraktor masih lemah. Hal tersebut dilihat dari pada pelaksanaan yang masih terdapat kendala sehingga mengakibatkan pengawasan kepada kontraktor tidak berjalan sebagaimana mestinya. Disamping itu kurangnya pengawas yang mengakibatkan kurang efektifnya pengawasan yang dilakukan terhadap kontraktor. Saran yang dapat diberikan hendaknya Kinerja Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Bidang Pemeliharaan Jalan perlu memperhatikan aturan yang sesuai dalam pelaksanaan dan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk terlibat dalam pengawasan agar kegiatan berjalan lebih optimal serta pengawasan terhadap kontraktor ditingkatkan dengan menambah tenaga pengawas yang ada dan melakukan kerjasama dengan kontraktor agar lebih selektif dalam pelaksanaan pemeliharaan jalan, agar terhindar dari hal hal yang tidak diinginkan

Kata Kunci : Kinerja, Pejabat, Pelaksana, Pengawasan, Kontraktor

ABSTRACT

This research aims to determine the performance of Technical Implementing Officials for Road Maintenance Activities and determine the Supervision of Contractors at the East Lampung Regency PUPR Service. Researchers collected data by means of observation, interviews and documentation, while the analysis used qualitative analysis. Based on field results, it shows that the supervision of road maintenance carried out by the Technical Implementing Officer for Road Maintenance Activities towards contractors is still weak. This can be seen from the fact that there are still obstacles in implementation, resulting in supervision of contractors not running as it should. Apart from that, the lack of supervisors has resulted in less effective supervision of contractors. Suggestions that can be given are that the Performance of Technical Implementing Officials for Road Maintenance Activities needs to pay attention to appropriate regulations in implementation and provide opportunities for the community to be involved in supervision so that activities run more optimally and supervision of contractors is improved by increasing existing supervisory staff and collaborating with contractors. to be more selective in carrying out road maintenance, to avoid undesirable things.

Keywords: Performance, Officials, Executors, Supervision, Contractors

PENDAHULUAN

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara yang mempunyai jabatan pokok yang didelegasikan oleh Pengguna Anggaran Keuangan. Rencana Keuangan yang Disetujui untuk melakukan atau membantu keperluan PA/KPA dalam rangka menentukan pilihan-pilihan yang berkaitan dengan biaya belanja daerah. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan saat ini mempunyai 1 penugasan baru mengingat Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, yaitu kewenangan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan untuk melakukan tugas Pengambilan barang/jasa sesuai dengan perauran perundang-undangan. Ketentuan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan ini hanya berlaku bagi legislatif yang bersifat kewenangan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menyelesaikan 1 (satu) atau beberapa pelaksanaan program sesuai dengan bidang tugasnya (Hunta et al., 2021).

Melaksanakan kewajibannya, pejabat pelaksana teknis Kegiatan memerlukan bantuan kontraktor agar dapat menyelesaikan kewajibannya dengan berhasil dan mahir. Kontraktor

adalah orang perseorangan atau badan hukum yang dikontrak atau direkrut oleh pemilik usaha untuk melakukan pekerjaan sesuai dengan pemahaman perjanjian yang disepakati dan sesuai dengan penguasaannya. Pekerjaan kontraktor dibatasi oleh waktu penyelesaian, biaya, dan hal-hal yang harus diselesaikan berdasarkan perjanjian (Lara, 2022).

Dukungan jalan memegang peranan penting sebagai salah satu roda penggerak kemajuan perbaikan daerah. Kerangka jalan berkualitas baik juga akan menghasilkan perubahan besar. Kabupaten Lampung Timur merupakan salah satu daerah pelaksana otonomi daerah yang mempunyai kedudukan luar biasa dalam mengontrol dan mengurus pemerintahannya sendiri, salah satunya mengawasi dukungan jalanan. Persoalan pemeliharaan jalan di lingkungan Dinas PUPR salah satunya adalah dukungan jalan, salah satunya di Kabupaten Lampung Timur (Rahmaniya, 2020).

Penunjang jalan merupakan kegiatan yang menghubungkan suatu titik dengan titik-titik lain yang akan dilalui atau dimanfaatkan. Dalam hal ini pemeliharaan jalan dijadikan landasan transportasi darat yang meliputi seluruh bagian jalan. Melihat pentingnya menjaga

jalan-jalan yang merupakan fasilitas utama bagi masyarakat dalam kegiatannya dan menjaga keamanan, kenyamanan dan kelancaran berkendara, terus memantau dan mendukung jalan-jalan untuk mengantisipasi atau mencegah penurunan kualitas jalanan itu sendiri sangatlah penting (Rahmaniya, 2020).

Kabupaten Lampung Timur sendiri yang mempunyai tugas mengawasi dan menjaga jalan adalah Dinas PUPR Kabupaten Lampung Timur, khususnya Bidang Bina Marga. mempunyai tugas utama untuk melakukan beberapa urusan Pemerintahan Teritorial, salah satu tugas utama Bidang Bina Marga adalah melakukan pengawasan pemeliharaan jalan melalui penunjukan pejabat pelaksana teknis kegiatan bidang pemeliharaan jalan (Iverson & Dervan, n.d.)

Pengawasan merupakan alat kontrol untuk memutuskan apakah otoritas publik telah melakukan kewajiban dan tanggungjawabnya sesuai pedoman dan keentuan yang berlaku. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Pemeliharaan Jalan adalah orang yang memiliki informasi dan keterlibatan dengan bidang pembangunan yang akan melakukan pengawasan pemandu dan memimpin beberapa pekerja untuk mengerjakan proyek

perbaikan, misalnya dukungan jalan yang dilakukan oleh kontraktor. Pengawasan yang dilakukan oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Pemeliharaan Jalan untuk membatasi kesalahan atau pelanggaran yang mungkin terjadi dalam kegiatan. Pengawasan dilakukan untuk menyaring kontraktor dalam proses pengakuan proyek sehingga dapat dicapai dengan baik berdasarkan harapan dan target utama (Lara, 2022).

Berdasarkan observasi di lapangan, ada beberapa permasalahan yang ada, misalnya saja kinerja Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang belum ideal karena cara kerja sesuai pedoman belum terselesaikan dengan baik dalam pengawasan termasuk melibatkan masyarakat dan lemahnya pengelolaan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dukungan jalan terhadap pekerja proyek sehingga jalan lebih mudah dirusak di bagian pinggirnya. kiri dan kanan, kosong dan bergelombang (Deti et al., 2019). Ketika ketidakberdayaan pengawasan disebabkan oleh penundaan dukungan jalanan, misalnya, tahun ini hal tersebut diatur namun diselesaikan pada tahun berikutnya, sehingga menyulitkan pengawas untuk melakukan pengawasan terhadap kontraktor. Jadi penting untuk memberikan pintu terbuka kepada

masyarakat untuk terlibat dengan pihak pengawas sehingga kegiatan berjalan lebih ideal dan pengawasan terhadap kontraktor diperluas dengan memperluas tenaga pengawas yang ada dan bekerja sama dengan kontraktor agar lebih spesifik dalam menyelesaikan pekerjaan. dukungan jalanan, untuk menjauhi hal-hal yang tidak menguntungkan. Selain itu, pengaturan yang harus dilakukan oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Pemeliharaan Jalan antara lain adalah pengendalian dan perincian jalannya kegiatan, penyiapan arsip-arsip yang berkaitan dengan jalannya pelaksanaan anggaran dan pengaturan penerimaan pengadaan barang dan jasa (Muskibah & Hidayah, 2020).

Hasil latar belakang tersebut maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Kinerja Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Bidang Pemeliharaan Jalan Dalam Melakukan Pengawasan Kontraktor di Dinas PUPR Kabupaten Lampung Timur.

Merupakan bagian awal penelitian yang harus dilakukan oleh peneliti. Peneliti perlu menguraikan identifikasi masalahnya sehingga masalah penelitiannya menjadi jelas dalam latar belakang masalahnya, adapun identifikasi masalah sebagai berikut :

1. Belum optimalnya kinerja pegawai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
2. Lemahnya pengawasan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pemeliharaan jalan terhadap kontraktor

Penjelasan latar belakang tersebut, maka dapat dirumuskan suatu masalah sebagai berikut”Bagaimana Kinerja Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Bidang Pemeliharaan Jalan dalam Melakukan Pengawasan Kontraktor di Dinas PUPR Kabupaten Lampung Timur

Tujuan Penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana Kinerja Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Bidang Pemeliharaan Jalan di Dinas PUPR Kabupaten Lampung Timur
2. Untuk mengetahui bagaimana Pengawasan Kontraktor di Dinas PUPR Kabupaten Lampung Timur.

METODE PENELITIAN

Penggunaan metode dalam riset ini adalah metode deskriptif kualitatif yang mana pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan telaah dokumentasi kemudian mendeskripsikan hasil temuan dengan mengkaji teori sebagai bahan analisis dnegan disesuaikan temuan di lapangan. Penelitian kualitatif dipilih dengan pertimbangan bahwa

permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah mendeskripsikan, menguraikan tentang masalah penelitian yang meliputi implementasi Sistem Informasi Manajemen Dalam Pelayanan Admindak Berbasis Digital di Desa Sumber Lele (Sakir et al., 2023). Data hasil penelitian kemudian dianalisis dengan analisis kualitatif yang mencakup tahapan pengumpulan data, kondensasi data, tampilan data dan menarik kesimpulan atau verifikasi. Objek observasi dalam riset ini dilakukan dengan kajian literatur dan narasumber yang dianggap dianggap paham mengenai hal yang akan dikaji. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sesuatu pada objek alamiah yang merupakan antithesis dari eksperimen. Di sini, peneliti berfungsi sebagai instrumen kunci. Sumber data yang yang digunakan berasal dari sumber tertulis seperti laman jurnal ilmiah, buku, dan arsip resmi sebagai bahan referensi yang dimanfaatkan untuk memperoleh jawaban dan dianalisis menggunakan teori Implementasi Kebijakan Edward III. Melalui berbagai perspektif atau pandangan diharapkan diperoleh hasil yang mendekati kebenaran sesuai temuan dilapangan (Pada et al., 2023).

HASIL PENELITIAN DAN

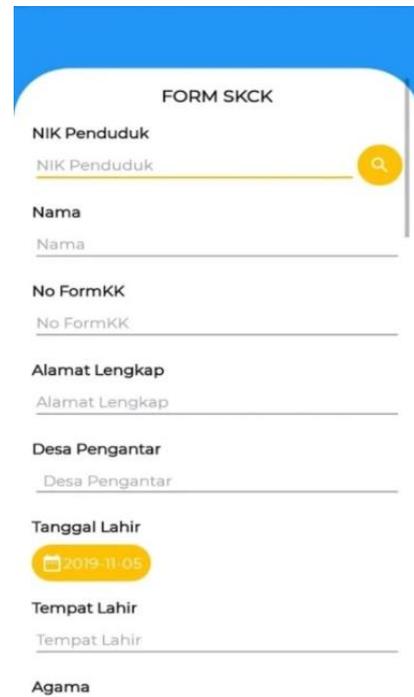
PEMBAHASAN

Kemajuan teknologi informasi sebagai bagian dari globalisasi tidak terpisahkan dari masyarakat modern seperti sekarang ini yang telah membawa tuntutan yang besar bagi masyarakat terhadap pemerintah sebagai penyedia layanan untuk lebih bersifat terbuka, lebih efektif dan efisien dalam melaksanakan tugas pemerintahannya, dan juga memberikan kemudahan terhadap akses informasi khususnya informasi tentang pemerintahan. Sehingga mendorong pemerintah untuk melaksanakan sebuah konsep tata pemerintahan baik yang lazim disebut dengan *good governance*. Kaitannya dalam perwujudan pelayanan publik yang *good governance*, pemerintah dituntut untuk beradaptasi dengan perkembangan teknologi agar tidak tertinggal (Atthahara, 2018).

Salah satu inovasi pelayanan yang bernama aplikasi LAPAK merupakan hasil kerja keras dan komitmen untuk memberikan pelayanan yang lebih baik kepada warga. Untuk itu, diperlukan suatu terobosan yang berbasis TI untuk memangkas waktu dan biaya yang dikeluarkan warga dalam mengurus administrasi kependudukan. Program aplikasi ini memiliki tujuan untuk

mencapai pelayanan Kecamatan Dringu yang prima dengan memudahkan pelayanan, optimalisasi dan transparansi pelayanan serta mempersingkat proses pelayanan di wilayah Desa Sumber Lele.

Gambar 1. Aplikasi LAPAK dan Fitur-fiturnya



Sumber: *Google Playstore*

Layanan Cepat Administrasi Kecamatan yang selanjutnya disingkat LAPAK adalah penyelenggaraan pelayanan publik di kecamatan secara cepat dan tepat dari tahap permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen dalam satu tempat secara online melalui teknologi informasi. Pelayanan ini merupakan Pelayanan publik yang ada di Kecamatan dan desa yang berada di bawah Pemerintahan Daerah Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Aplikasi Ini memproses permohonan warga terhadap surat keterangan, surat perijinan, pelayanan kependudukan dan pelayanan administrasi lain yang akan

mengubungkan desa dan kecamatan yang ada di seuruh Kabupaten Probolinggo.

Potensi tentang inovasi pelayanan publik melalui program Aplikasi Lapak merupakan terobosan baru untuk mempermudah dan mempercepat pelayanan masyarakat berbasis online, sehingga masyarakat dapat menikmati pelayanan dengan cepat dan efisien. Dengan aplikasi ini masyarakat bisa mengurus atau melengkapi surat-surat administratif tanpa hadir ke kantor Desa dan Kantor Kecamatan. Layanan digital ini sangat efektif.

Pada bagian ini peneliti akan menguraikan hasil temuan di lapangan mengenai Implementasi Sistem Informasi Manajemen Pelayanan Adminduk Berbasis Digital Di Desa Sumber Lele yang dikaji dan dianalisis menggunakan teori implementasi kebijakan menurut Edward III. Dalam pendekatan berdasarkan Edwards III, terdapat empat variabel untuk mengetahui keberhasilan implementasi suatu kebijakan publik, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Hasil temuan dan analisis di jabarkan sebagai berikut:

a. Komunikasi

Menurut Edward, komunikasi adalah unsur paling penting yang harus dilakukan dalam implementasi kebijakan.

Apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus di komunikasikan kepada kelompok sasaran, sehingga target sasaran akan paham mengenai maksud dan tujuan dari kebijakan tersebut. Sebab kebijakan yang dijalankan apabila tidak sesuai dengan tujuan dan sasaran maka akan menimbulkan sebuah distorsi implementasi.

Berdasarkan hasil temuan, dalam implementasi sistem informasi manajemen pelayanan adminduk berbasis digital di Desa Sumber Lele dengan menggunakan aplikasi LAPAK yaitu komunikasi yang dilakukan oleh perangkat desa dilaksanakan melalui sosialisasi kepada masyarakat dengan memberikan informasi terkait penggunaan aplikasi sebagai pengurusan surat ditingkat desa dan kecamatan. Namun disayangkan pada saat adanya sosialisasi tidak semua masyarakat desa Sumber lele turut serta dalam kegiatan sosialisasi tersebut, sehingga masih ada sebagian masyarakat yang belum mengetahui penggunaan aplikasi tersebut. Peneliti menilai bahwa cara komunikasi yang dilakukan oleh perangkat desa belum optimal, sebab komunikasi bisa dilaksanakan secara vertikal dan horizontal. Maksudnya adalah bukan saja melalui sosialisasi untuk komunikasi dalam penyampaian informasi mengenai

implementasi sistem informasi tersebut, tetapi juga bisa melalui media sosial yang ada serta biasa digunakan oleh desa, dengan penggunaan media sosial yang maksimal maka informasi mengenai penerapan sistem *adminduk* di Desa Sumber lele akan cepat tersampaikan kepada masyarakat sekitar.

b. Sumber Daya

Sumber daya adalah faktor penting yang menjadi keberhasilan dalam implementasi kebijakan, tanpa sumber daya yang memadai serta minim pelaksanaan kebijakan akan mengalami keterhambatan. Sumber daya disini terbagi menjadi dua, yakni sumber daya financial dan sumber daya manusi. Sebaik apapun dirancang sebuah kebijakan apabila sumber daya yang dibutuhkan untuk pelaksanaannya terbatas, maka pencapaian tujuannya akan terganggu dan bisa saja implementasi sebuah kebijakan akan gagal. Begitu juga dengan implementasi dari sistem informasi manajemen pelayanan *adminduk* berbasis digital di Desa Sumber Lele yang juga memerlukan sumber daya yang baik dan tercukupi.

Berdasarkan hasil temuan di lapangan didapat bahwa dalam implementasi pelayanan *adminduk* di Desa Sumber lele sumber daya yang

dibutuhkan sangatlah beragam, Dari segi infrastruktur teknologi aplikasi *lapak* masih harus terus dikembangkan seiring dengan makin banyaknya tuntutan akan pelayanan publik bagi masyarakat lewat aplikasi sehingga dinas terkait harus terus *upgrade* aplikasi tersebut sehingga semakin layak digunakan bagi masyarakat.

Sumber daya anggaran dirasa cukup untuk mengimplementasikan program tersebut dana desa yang diperoleh digunakan sebagai pengelolaan fasilitas dan pengembangan sistem informasi aplikasi *LPAK*. Sedangkan dari segi sumber daya manusia manusia dalam pengelolaan sistem masih kurang, sering terjadinya hambatan dalam mengakses aplikasi disebabkan karena ketidaktahuan sumber daya dari pengelola sisten tersebut sehingga menimbulkan *trouble* atau *down* pada penggunaan sistem. Dari komentar-komentar masyarakat setempat mayoritas terkait dengan kesulitan membuat akun atau login ke aplikasi tersebut padahal mereka memiliki *NIK* Kabupaten Probolinggo. Namun demikian tidak menyurutkan keinginan pemerintah setempat untuk memberikan layanan terbaik dengan terus mengembangkan Aplikasi *lapak* tersebut.

Berdasarkan segi ketersediaan sumber daya manusia harus lebih ditingkatkan karena petugas sebagai operator perlu banyak ilmu untuk mengoperasikan surat-suratnya. Sumber daya merupakan elemen yang cukup penting dalam penerapan *e-government* sehingga semakin banyak pegawai yang memahami teknologi, informasi dan Komunikasi tentunya akan semakin lebih baik.

c. Disposisi

Watak, sikap dan kemauan pelaksana sebagai aktor implementasi kebijakan. kesungguhan para pelaksana dalam bekerja. Sikap pelaksana merupakan hal yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan sebuah kebijakan. Hal ini berkaitan erat dengan kemampuan kerja serta kemauan para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan tersebut. Dari hasil penelitian yang dilakukan, dapat ditarik garis besar bahwa tingkat pengetahuan perangkat desa dalam pengelolaan sistem informasi administrasi kependudukan melalui website maupun aplikasi lapak belum cukup baik dalam pengelolaan sistem informasi, namun kemauan para pengelola sistem tersebut sangat tinggi untuk dapat mengembangkan aplikasi LAPAK.

Pelayanan yang responsif mengenai berbagai laporan atau keluhan yang dikeluarkan oleh masyarakat desa sumber lele selalu cepat ditanggapi oleh pemerintah desa. pemerintah bertanggung jawab dalam proses pelayanan publik tersebut. Melalui aplikasi Lapak masyarakat dapat dengan mudah mengurus surat administrasi yang dibutuhkan karena Operator mengirim form dan lampiran-lampiran melalui aplikasi Lapak kepada Kepala Desa untuk mendapatkan persetujuan Kepala Desa jika dalam hal Kepala Desa setuju, maka ditekan tombol persetujuan, jika tidak maka dikembalikan lagi ke operator untuk dilengkapi persyaratannya. Dari sini terlihat pemberian pelayanan publik kepada masyarakat terkait kinerja pemerintah.

Selain itu, aplikasi ini juga dapat meminimalisasi praktek percaloan atau pungli bagi para pencari kerja. Aplikasi LAPAK jika kita lihat di aplikasi Play Store aplikasi lapak mendapatkan rating 4,4 dari 5 penilaian dengan berbagai komentar dari pengguna layanan, sehingga pemerintah setempat perlu mengembangkan aplikasi ini dan meningkatkan kemampuan pengelola sistem untuk dapat menjalankan aplikasi dengan baik.

d. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi pada pemerintahan berpengaruh penting terhadap implementasi kebijakan, kebijakan dalam proses penyusunan diimplementasikan untuk mencapai sebuah tujuan dan memecahkan persoalan yang ada di masyarakat serta mempertahankan citra pemerintah. Menurut teori Edward III Implementasi kebijakan yang bersifat kompleks menuntut adanya kerjasama banyak pihak. Ketika struktur birokrasi tidak kondusif terhadap implementasi suatu kebijakan, maka hal ini akan menyebabkan ketidakefektifan dan menghambat jalannya pelaksanaan kebijakan. Berdasarkan penjelasan di atas, maka memahami struktur birokrasi merupakan faktor yang fundamental untuk mengkaji implementasi kebijakan publik (Delpiero Roring et al., 2021).

Berdasarkan teori Edward III jika dikaitkan dengan hasil temuan peneliti mendapatkan jawaban bahwa implementasi sistem informasi manajemen berbasis *website* dan aplikasi LAPAK di Desa Sumber Lele bahwa struktur organisasi telah diatur oleh tingkat di atasnya, sesuai dengan Peraturan bupati Kabupaten Probolinggo No 84 Tahun 2017 Tentang Layanan Cepat

Administrasi yang terbentuk tim dalam setiap desa untuk bertindak megoperasikan layanan secara online dengan baik yang didasarkan pada sumber daya yang ada.

Besar tidaknya manfaat *e-government* aplikasi lapak adalah masyarakat desa sebagai penerima pelayanan untuk itu, perlu ketelitian dalam memilih aplikasi yang menjadi prioritas kebutuhan masyarakat yang perlu didahulukan dalam pembangunan dan pengembangannya dalam sektor pelayanan publik. Jika kita melihat di *Play Store* aplikasi lapak sudah diunduh lebih dari limaratus kali. Dari sini terlihat adanya antusiasme masyarakat yang ingin menikmati pelayanan lewat aplikasi lapak tersebut, meskipun masih sering terjadi kendala dalam akses sistem tersebut. Selain itu juga perlu adanya penambahan layanan-layanan yang diberikan sehingga pelayanan yang diberikan lewat aplikasi semakin sempurna.

Penerapan aplikasi lapak pasti memiliki implikasi dan juga manfaat pada penyelenggaraan sistem administrasi kependudukan. Dampak dan manfaat ini dapat dirasakan oleh pihak kecamatan itu sendiri maupun masyarakat sekitar. Dengan pemanfaatan teknologi informasi yang semakin maju maka pelayanan publik bisa dilaksanakan dengan efektif

dan juga efisien dengan adanya inovasi aplikasi lapak. Bila teknologi informasi yang adadapat dimanfaatkan semaksimal mungkin maka dampak yang diberikan akan langsung terlihat, sehingga pelayanan publik dapat berjalan dengan baik. Komputerisasi memudahkan mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Pembuatan dokumen kependudukan juga dapat diselesaikan bahkan dalam waktu sehari saja.

Dari segi administrasi juga menjadi lebih rapih dan mengurangi limbah kertas karena semua laporan kearsipan disimpan secara online. Dampak dan manfaat dari penerapan Aplikasi Lapak tidak hanya dirasakan oleh pemerintah Desa Sumber Lele Kecamatan Kraksaan saja, tetapi juga masyarakat sekitar. Mengingat tujuan penerapan *E-Government* berbasis aplikasi lapak ini adalah untuk memudahkan masyarakat dalam pelayanan publik di bidang administrasi kependudukan. Masyarakat menjadi lebih mudah dalam mengurus dokumen kependudukan karena dapat selesai lebih cepat. Semua persyaratan mengenai pengurusan dokumen kependudukan sudah jelas dipaparkan sehingga tidak berbelit. Jika masih merasa kesulitan, perangkat desa atau kecamatan dengan sigap membantu mengarahkan dan

menjawab pertanyaan dari masyarakat.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan pada penelitian ini, maka dapat ditarik kesimpulan, yaitu implementasi sistem informasi manajemen dalam pelayanan adminduk berbasis digital dengan memanfaatkan website dan aplikasi lapak Pada Desa Sumber Lele, Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo belum optimal berdasarkan kajian analisis teori implementasi kebijakan Edward III yang terdiri atas empat elemen, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Masih terjadi kendala kepada masyarakat yang akan mengkases untuk melakukan proses pelayanan administrasi pembuatan surat-menyurat.

Namun dari segi tingkat keefktifan dalam pelayanan sistem administrasi ini memberikan manfaat yakni aparat desa dapat mendata penduduk dengan lebih efektif dan efisien serta melakukan pencarian data dengan cepat melalui fitur pencarian yang disediakan. Diharapkan dengan adanya sistem informasi manajemen ini dapat mempercepat proses pelayanan administrasi kependudukan dan meningkatkan efisiensi dalam pembuatan surat-menyurat.

DAFTAR PUSTAKA

- Atthahara, H. (2018). Inovasi pelayanan publik berbasis e-government: studi kasus aplikasi Ogan Lopian Dinas Komunikasi dan Informatika di Kabupaten Purwakarta. *Jurnal Politikom Indonesiana*, 3(1), 66–77. <https://journal.unsika.ac.id/index.php/politikomindonesiana/article/view/1412%0Ahttps://journal.unsika.ac.id/index.php/politikomindonesiana/article/download/1412/1167>
- Delpiero Roring, A., Mantiri, M. S., & Lopian, M. T. (2021). Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Penanganan Virus Corona (Covid 19) Di Desa Ongkaw 1 Kecamatan Sinonsayang Kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal Governance*, 1(2), 2021.
- Deti, M., Je, K., & Nisanson, M. Y. (2019). Analisis Kepuasan Pejabat Pembuat Komitmen Pada Pekerjaan Jalan Bidang Bina Marga Di Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Ende. *Teknosiar*, 13(1), 36–45. <https://doi.org/10.37478/teknosiar.v13i1.231>
- Hunta, A. A., Tinangon, J. J., & Walandouw, S. K. (2021). Evaluasi Sistem dan Prosedur Penertiban Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) pada Dinas Koperasi Kota Bitung. *Jurnal EMBA*, 9(3), 1245–1256.
- Muskibah, M., & Hidayah, L. N. (2020). Penerapan Prinsip Kebebasan Berkontrak Dalam Kontrak Standar Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Di Indonesia. *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 4(2), 175–194. <https://doi.org/10.24246/jrh.2020.v4.i2.p175-194>
- Pada, S., Sumber, D., Kraksaan, K., Probolinggo, K., Rahmadi, A. N., & Q, M. S. (2023). PELAYANAN ADMINDUK BERBASIS DIGITAL birokrasi menerapkan e-governance secara E-government menggunakan penggunaan teknologi komunikasi dan. 08(01), 18–30.
- Rahmaniya. (2020). Implementasi Peran Pemerintah Daerah Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Lampung Timur Dalam Perbaikan Jalan Rusak *Perspaktif Fiqh Siya<Sah*. 71. <http://repository.radenintan.ac.id/11917/>
- Sakir, S., Mutiarin, D., & Afisa, A. (2023). Digitalisasi Kalurahan: Pendampingan Optimalisasi Website dan Media Sosial Sebagai Layanan Berbasis Digital di Kalurahan Sendangarum Minggir Sleman. *Abdi: Jurnal Pengabdian Dan Pemberdayaan Masyarakat*, 5(2), 271–277. <https://doi.org/10.24036/abdi.v5i2.390>
-